

PERUBAHAN ANGKA KEMISKINAN DI PROVINSI JAWA TIMUR PADA PRA DAN ERA OTONOMI DAERAH

Wiwini Uhsinatul M.
millawiwini@gmail.com

Abdur Rofi
abdurrofi@yahoo.co.uk

ABSTRACT

Poverty is one of the social economic problems in regional development that cannot easily be addressed until now. Decentralization policy provides the authority to local governments in managing their own territory included in the set of policies in order to reduce the number of poor people. This research aims to identify the changes of poverty rate in East Java Province before decentralization and decentralization eras, and to determine the pattern of distribution of poverty, as well as the correlation between the changes of Human Development Index (HDI) and the changes of development expenditure with the changes of poverty rate. This research found that the changes of poverty rate that occurs in majority of district in East Java Province has decreased significantly, and only a small part of East Java Province that the poverty rates has increased. While the distribution of poverty that occur tend to be concentrated in the coastal areas both North and South, as well as on the border of East Java and Central Java. The research also found that the changes of Human Development Index (HDI) and the changes of development expenditure had not a significant correlation with the changes of poverty rate.

Keyword : Poverty, Poverty Rate, Decentralization, Human Development Index (HDI).

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan sosial ekonomi yang sulit diatasi hingga saat ini. Kebijakan otonomi daerah memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengelola daerahnya termasuk menetapkan kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, pola distribusi angka kemiskinan, serta hubungan antara perubahan IPM dan perubahan pengeluaran pembangunan dengan perubahan angka kemiskinan pada pra dan era otonomi daerah. Penelitian ini menemukan bahwa perubahan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur pada pra dan era otonomi daerah mayoritas mengalami penurunan angka kemiskinan signifikan, hanya sebagian kecil mengalami peningkatan angka kemiskinan. Distribusi kemiskinan pada pra otonomi daerah cenderung terkonsentrasi di daerah pesisir, pesisir utara dan pesisir selatan, serta di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Era otonomi daerah angka kemiskinan cenderung terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Timur. Sementara perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perubahan pengeluaran pembangunan tidak memiliki hubungan signifikan dengan perubahan angka kemiskinan.

Kata Kunci : Kemiskinan, Angka Kemiskinan, Otonomi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu kegiatan mengelola sumberdaya daerah yang melibatkan segenap pemerintah daerah tersebut dan juga seluruh komponen masyarakat dengan cara menjalin sebuah hubungan kerja sama yang baik untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan kegiatan perekonomian yang berkembang untuk kesejahteraan rakyat. (Lincoln Arsyad, 1999; Blakely, 1989 dalam Kuncoro, 2004). Pembangunan ekonomi daerah bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pelaksanaannya berdasarkan suatu rencana dan dilakukan secara terus menerus. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah semakin ditingkatkan sejalan mulai diberlakukannya sistem otonomi daerah. Otonomi daerah mulai dicanangkan oleh pemerintah pusat pada 1 Januari 2001 yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan Daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas daerah tertentu yang berwenang mengelola, mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang No 22 tahun 1999 kemudian dilakukan revisi menjadi Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sebagai negara kepulauan yang terdiri atas 33 provinsi dengan keberagaman kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan ketentuan atau peraturan pemerintahan menyebabkan Indonesia menghadapi persoalan kemiskinan yang sangat kompleks

dan beragam pada masing – masing provinsi. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi dibandingkan beberapa provinsi lain di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa (Lihat Tabel 1.).

Tabel 1. Tingkat Kemiskinan di Pulau Jawa Tahun 2000 dan 2010

Provinsi	Penduduk Miskin (%)	
	2000	2010
DKI Jakarta	4.96	3.48
Jawa Barat	15.40	11.27
Jawa Tengah	21.16	16.56
Yogyakarta	33.39	16.83
Jawa Timur	22.77	15.26
¹ Banten	-	7.16

Sumber : Data dan Informasi Kemiskinan Buku 1, 2003; Statistik Indonesia, 2012.

Berdasarkan Tabel 1. dapat dilihat bahwa angka kemiskinan di Jawa Timur berada pada urutan kedua pada pra otonomi daerah dan berada pada urutan ketiga pada era otonomi daerah. Meskipun demikian, Provinsi Jawa Timur telah meraih penghargaan sebagai penyelenggara otonomi daerah dengan prestasi terbaik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, sebagaimana ditulis dalam harian *Review of Indonesian and Malaysian Affairs* (Anonim, 2012). Oleh sebab itu keberhasilan otonomi daerah yang diselenggarakan oleh Provinsi Jawa Timur seharusnya mampu menurunkan tingkat kemiskinan.

Provinsi Jawa Timur termasuk kedalam tiga provinsi dengan tingkat kemiskinan tinggi setelah Provinsi DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. Tahun 2000 tingkat kemiskinan Jawa Timur sebesar 22.77 persen. Tingkat kemiskinan di Jawa Timur merupakan tingkat kemiskinan dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Keberhasilan pembangunan juga dilihat dari pembangunan manusia yang dicerminkan melalui nilai Indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks

¹ Merupakan daerah pemekaran dari Provinsi Jawa Barat yang baru terbentuk pada pertengahan tahun 2000, sehingga data angka kemiskinan tahun 2000 belum tersedia dan oleh sebab itu perubahan angka kemiskinan tidak dapat diketahui

Pembangunan Manusia (IPM) mencerminkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), yang asumsinya jika kualitas SDM tinggi akan membawa dampak pada tingginya kemampuan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi, sehingga mencegah timbulnya kemiskinan dan atau membantu menurunkan tingkat kemiskinan.

Secara konseptual, Badan Pusat Statistik (2011) mendefinisikan kemiskinan menjadi dua, yaitu :

1. Kemiskinan Relatif : kemiskinan / kondisi miskin yang terjadi karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan.
2. Kemiskinan Absolut : tingkat kemiskinan yang ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. Kebutuhan pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan dasar tersebut dikenal sebagai istilah garis kemiskinan.

Menurut Sharp (1996) terdapat tiga penyebab kemiskinan jika dilihat dari sudut pandang ekonomi. **Pertama**, ketidakseimbangan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. **Kedua**, perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang berkaitan dengan produktivitas dan upah yang rendah. **Ketiga**, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Penyebab kemiskinan menurut masyarakat miskin sendiri adalah kurangnya modal, pendidikan, keterampilan, kesempatan kerja dan rendahnya pendapatan (dikutip dari Wijayanto, 2010).

Orang miskin cenderung mengelompok di tempat-tempat tertentu. Variasi geografis terhadap timbulnya kemiskinan dan besarnya kemiskinan disebabkan oleh faktor spasial seperti dukungan sumber daya alam dan akses layanan sosial termasuk pelayanan kesehatan, pendidikan, tenaga kerja dan pasar produk (Henninger dan Snel, 2002). Dalam

penelitiannya, Mega Puspitasari, Vitri Nurmalasari dan Achmad Sjafii (2011) menemukan bahwa pola spasial kemiskinan di Jawa Timur pada tahun 2003-2007 cenderung tinggi di Kabupaten Bangkalan, Sampang, Tuban, Situbondo, dan Pacitan yang merupakan daerah pesisir.

Tahun 2010, Provinsi Jawa Timur memiliki nilai IPM sebesar 71,62. Nilai tersebut merupakan peringkat ke-5 di Pulau Jawa. Ini menunjukkan bahwa kualitas SDM di Provinsi Jawa Timur masih sangat rendah dibandingkan dengan kualitas SDM provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa (Lihat tabel 2).

Tabel 2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pulau Jawa Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia	
	2009	2010
DKI Jakarta	77.36	77.60
Jawa Barat	71.64	72.29
Jawa Tengah	72.10	72.49
DI Yogyakarta	75.23	75.77
Jawa Timur	71.06	71.62
Banten	70.06	70.48

Sumber :Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, 2010.

Salah satu syarat yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan atas dasar desentralisasi, yaitu tersedianya sumber-sumber keuangan sebagaimana telah diatur dalam Undang – Undang No. 34 tahun 2004. Sumber keuangan pemerintah daerah berasal dari APBD. Melalui dana dari APBD tersebut diharapkan pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien untuk mencapai terciptanya pemerataan pembangunan (kesejahteraan) (Darise, 2009).

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui perubahan angka kemiskinan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur pada pra dan era otonomi daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pola distribusi angka kemiskinan yang terjadi di Jawa Timur, serta untuk mengetahui hubungan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan perubahan pengeluaran pembangunan terhadap perubahan angka

kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada pra dan era otonomi daerah.

METODE PENELITIAN

Pemilihan Daerah Penelitian

Pemilihan daerah penelitian berdasarkan beberapa alasan. Alasan yang pertama adalah Provinsi Jawa Timur merupakan penyelenggara otonomi daerah dengan prestasi terbaik untuk tingkat provinsi, kabupaten, dan kota dengan diperolehnya penghargaan pada tahun 2010. Alasan yang kedua adalah karena Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan jumlah dan persentase penduduk miskin tinggi yaitu 15,26 persen pada tahun 2010. Sedangkan alasan yang ketiga karena berdasarkan pengetahuan peneliti, masih sedikit penelitian tentang kemiskinan dengan lokasi penelitian di Provinsi Jawa Timur.

Jenis Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain :

1. Persentase penduduk miskin untuk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 dan 2010. Data diperoleh dari buku “Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2002 dan 2010” publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponennya untuk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 1999 (tahun 2000 data tidak tersedia) dan 2010. Data diperoleh dari buku “Analisis Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Jawa Timur Tahun 2002 dan 2010” publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur.
3. Pengeluaran Pembangunan Daerah yang diproksi kedalam data Pengeluaran untuk Kesejahteraan Sosial untuk masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur.

Metode Analisis Data

Perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada tahun pra dan era otonomi daerah dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif

kuantitatif. Pola distribusi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan analisis spasial dengan melalui sajian peta tematik. Untuk menjelaskan distribusi kemiskinan dilihat berdasarkan besarnya angka kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota. Penelitian ini fokus pada wilayah dengan angka kemiskinan tinggi, yaitu Kabupaten/Kota yang angka kemiskinannya diatas rata-rata angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis akan diperoleh apakah pola distribusi kemiskinan cenderung mengelompok di daerah pesisir atau tidak.

Hubungan perubahan IPM dan perubahan pengeluaran pembangunan dengan perubahan angka kemiskinan di Jawa Timur dianalisis dengan menggunakan metode analisis statistik korelasi. Cara yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variabel-variabel tersebut dengan berdasarkan nilai probabilitas, yakni nilai signifikan dari hasil uji korelasi:

- Probabilitas >0.05 , maka H_1 diterima, H_0 ditolak
- Probabilitas <0.05 , maka H_1 ditolak, H_0 diterima

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan Angka Kemiskinan Pada Pra dan Era Otonomi Daerah

Pada pra otonomi daerah yaitu tahun 2000 angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur sebesar 28,59 persen (10.115.739 jiwa). Sepanjang pemerintahan otonomi daerah tentu terdapat perubahan – perubahan yang mengarah pada kemajuan dan pertumbuhan suatu wilayah. Begitu pula dengan perkembangan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur yang mengalami perubahan signifikan dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Perubahan angka kemiskinan pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur hampir seluruhnya memiliki nilai minus. (-) yang artinya mengalami penurunan (Lihat Tabel 3). Banyak sekali Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan angka kemiskinan pada kisaran 10 persen hingga 20 persen yakni sebanyak 18 Kabupaten/Kota.

Tabel 3. Pembagian Wilayah Berdasarkan Besaran Perubahan Angka Kemiskinan Pada Pra dan Era Otonomi Daerah di Provinsi Jawa Timur

< 0 % (Meningkat)	0-10 (%)	10-20 (%)	20-30 (%)	>30 (%)
Kab. Lamongan	Kab. Situbondo	Kab. Pacitan	Kab. Malang	Kab. Ponorogo
Kab. Gresik	Kab. Nganjuk	Kab. Tulungagung	Kab. Sampang	Kab. Trenggalek
Kota Probolinggo	Kab. Bangkalan	Kab. Blitar	Kab. Pamekasan	Kab. Jember
	Kota Kediri	Kab. Banyuwangi		
	Kota Malang	Kab. Bondowoso		
	Kota Probolinggo	Kab. Pasuruan		
	Kota Pasuruan	Kab. Jombang		
	Kota Surabaya	Kab. Madiun		
	Kab. Sidoarjo	Kab. Magetan		
	Kab. Mojokerto	Kab. Ngawi		
	Kab. Probolinggo	Kab. Bojonegoro		
		Kota Blitar		
		Kota Mojokerto		
		Kab. Lumajang		
		Kab. Sumenep		
		Kab. Tuban		
		Kab. Kediri		
		Kota Madiun		

Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial & Ekonomi Jawa Timur, 2002 dan 2010 (Diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan angka kemiskinan paling sedikit berada pada kisaran 20 persen hingga 30 persen yang dalam hal ini hanya sebanyak 3 Kabupaten/Kota, begitu pula dengan perubahan angka kemiskinan yang besarnya mencapai minus 30 persen. Hampir semua Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami penurunan angka kemiskinan kecuali pada Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik dan Kota Probolinggo. Wilayah-wilayah tersebut merupakan wilayah pesisir Jawa Timur, yakni pesisir utara untuk Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik, serta wilayah pesisir selatan untuk Kota Probolinggo.

Wilayah berbeda tentu faktor penyebab kemiskinan juga berbeda. Jika dilihat dari jauh dekatnya dengan pusat provinsi yaitu Kota Surabaya sebagai ibu kota provinsi Jawa Timur, tidak semestinya Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik mengalami peningkatan angka kemiskinan dan menjadikan wilayah ini

memiliki angka kemiskinan tinggi. Sebab, secara logika aliran dana APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) yang merupakan sumber dana pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan pasti dengan mudah sampai pada kedua wilayah tersebut. Berbeda dengan wilayah-wilayah lain yang jauh dari pusat seperti Pulau Madura dan wilayah-wilayah di perbatasan.

Letak geografis Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik yang “bertetangga” dengan pusat provinsi juga menimbulkan pemikiran bahwa tidak mungkin jika angka kemiskinan pada kedua wilayah ini menjadi kurang diperhatikan pemerintah pusat, sebab angka kemiskinan Provinsi merupakan rata-rata dari angka kemiskinan masing-masing Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Meskipun pada dasarnya urusan kemiskinan telah menjadi tanggung jawab penuh pemerintah daerah Lamongan dan Gresik sebagaimana telah diberikan otonomi pada masing-masing

daerah, akan tetapi rasanya tidak mungkin jika pemerintah pusat tidak ikut berperan serta dalam menurunkan angka kemiskinan. Oleh sebab itu, melalui pemikiran tersebut dapat ditarik pernyataan bahwa peningkatan angka kemiskinan di Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik kemungkinan disebabkan oleh kurang maksimalnya kinerja pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Mungkin saja terkait kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak tepat sasaran dan kurang memihak daerah pesisir, karena stabilitas perekonomian yang terganggu, atau karena terjadinya bencana alam mengingat beberapa daerah di Kabupaten Lamongan yang hampir setiap tahun dilanda bencana banjir akibat luapan air dari Sungai Bengawan Solo.

Kota Probolinggo berbeda dengan Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik. Jika dilihat dari letak geografisnya wilayah ini cukup jauh dari pusat provinsi, sehingga mungkin saja angka kemiskinannya tinggi karena kurang mendapat perhatian dari pemerintah pusat dan atau karena aliran dana APBD yang kurang lancar, atau karena kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tidak/kurang sukses. Hal ini dapat dibandingkan dengan wilayah lain yang berbatasan dengan Kota Probolinggo, utamanya Kabupaten Probolinggo yang masih dalam satu kesatuan wilayah yang mengalami penurunan angka kemiskinan.

Terkait dengan kemiskinan di daerah pesisir, dapat dilihat pada Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Pamekasan yang juga merupakan daerah pesisir akan tetapi wilayah-wilayah ini memiliki prestasi baik dalam hal penanggulangan kemiskinan. Wilayah-wilayah tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga minus 20 persen dan 30 persen. Jika bicara mengenai perbedaan wilayah, maka akan berbeda pula kemampuan dan kapasitasnya dalam melakukan pembangunan daerah. Oleh sebab itu meskipun beberapa wilayah sama-sama daerah pesisir belum tentu perubahan angka kemiskinan yang dicapai akan sama pula.

Pola Distribusi Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Pada Pra dan Era Otonomi Daerah

Analisis distribusi kemiskinan yang diperhatikan pada penelitian ini hanyalah Kabupaten/Kota dengan angka kemiskinan tinggi, yakni Kabupaten/Kota di Jawa Timur yang memiliki angka kemiskinan diatas rata-rata angka kemiskinan provinsi. Tujuannya agar dapat dianalisis apakah ada hubungan antara tingginya angka kemiskinan dengan letak geografis suatu wilayah.

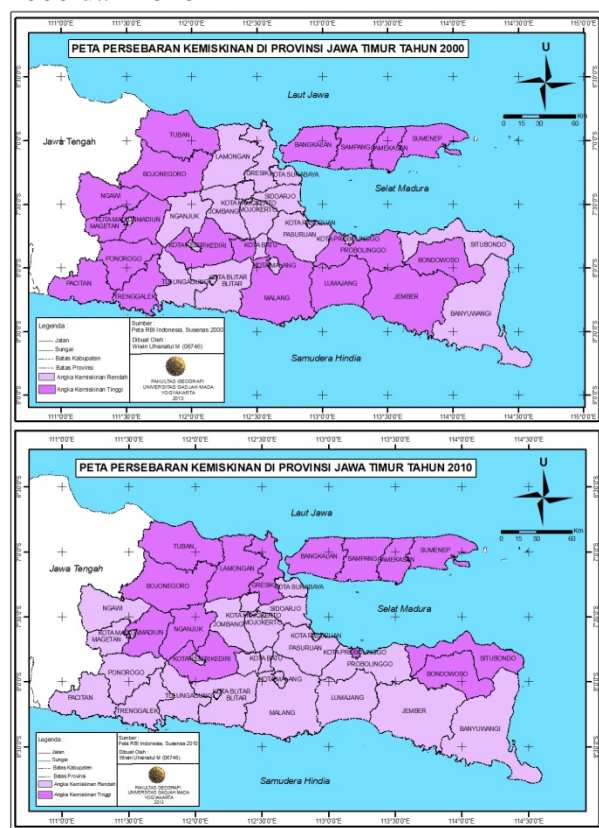
Tabel 4. Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dengan Kelas Kemiskinan Tinggi Tahun 2000 dan 2010

Tahun 2000	Tahun 2010
1. Kab. Pacitan	1. Kab. Pacitan
2. Kab. Ponorogo	2. Kab. Trenggalek
3. Kab. Trenggalek	3. Kab. Bondowoso
4. Kab. Blitar	4. Kab. Situbondo
5. Kab. Malang	5. Kab. Nganjuk
6. Kab. Jember	6. Kab. Madiun
7. Kab. Bondowoso	7. Kab. Ngawi
8. Kab. Magetan	8. Kab. Bojonegoro
9. Kab. Madiun	9. Kab. Lamongan
10. Kab. Ngawi	10. Kab. Gresik
11. Kab. Bojonegoro	11. Kab. Bangkalan
12. Kab. Bangkalan	12. Kab. Sampang
13. Kab. Sampang	13. Kab. Pamekasan
14. Kab. Pamekasan	14. Kab. Sumenep
15. Kab. Lumajang	15. Kab. Tuban
16. Kab. Sumenep	16. Kab. Kediri
17. Kab. Tuban	17. Kab. Probolinggo
18. Kab. Kediri	18. Kota Probolinggo
19. Kab. Probolinggo	

Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial & Ekonomi Jawa Timur, 2002 dan 2010 (Diolah)

Berdasarkan hasil peta tematik yang telah dibuat, pada pra otonomi daerah distribusi angka kemiskinan pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur secara umum memiliki pola yang mengelompok atau terkonsentrasi di daerah perbatasan yakni perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah, di pesisir utara yaitu Pulau Madura dan beberapa di pesisir selatan.

Gambar 1. Peta Persebaran Angka Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 dan 2010



Penyebab tingginya angka kemiskinan di pesisir Madura antara lain karena faktor kultural terkait pemikiran masyarakat yang menganggap pekerjaan paling menjanjikan hanyalah sebagai PNS. Faktor penyebab lainnya adalah karena keterbatasan lapangan pekerjaan. Mayoritas penduduk madura hanya bergantung pada sektor pertanian dan perikanan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Potensi perikanan memang melimpah di Pulau Madura, akan tetapi karena rendahnya kualitas SDM menjadikan potensi tersebut kurang memberikan kontribusi dalam upaya penurunan jumlah penduduk miskin.

Penduduk Madura lebih mementingkan bagaimana caranya mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dari pada harus menyelesaikan sekolahnya di SD/SMP. Hal inilah yang mengakibatkan rendahnya kualitas SDM dan kreativitas penduduk dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang lain.

Selain karena faktor-faktor tersebut, tingginya angka kemiskinan di Pulau Madura yakni di Kabupaten Sampang disebabkan oleh bencana banjir yang sering melanda wilayah ini. Faktor penyebab lain diantaranya karena permasalahan internal wilayah terkait kinerja pemerintah daerah. Misalnya pada Kabupaten Pamekasan, yang ditemui bahwa sering terjadi kasus penyalahgunaan wewenang pejabat-pejabat daerah dalam menyalurkan bantuan Raskin (beras miskin).

Distribusi angka kemiskinan di Jawa Timur pada pra dan era otonomi daerah tidak mengalami perbedaan signifikan. Beberapa daerah pesisir seperti Kabupaten Tuban dan keempat kabupaten di Pulau Madura masih memiliki angka kemiskinan tinggi. Kabupaten/Kota di daerah pesisir yang tidak lagi memiliki angka kemiskinan tinggi antara lain kabupaten-kabupaten di pesisir selatan yakni Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Jember. Semua Kabupaten/Kota yang berada pada wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah pada tahun 2000 memiliki angka kemiskinan tinggi. Tetapi pada tahun 2010 mengalami perubahan yakni pada Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Ponorogo yang telah mengalami penurunan angka kemiskinan.

Penurunan angka kemiskinan diduga disebabkan oleh banyaknya penduduk dari wilayah-wilayah tersebut yang pergi merantau ke luar daerah sehingga membawa banyak *remitten* dan mengakibatkan kondisi perkonomian meningkat dan angka kemiskinan pun menurun.

Hubungan Perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Perubahan Angka Kemiskinan di Jawa Timur.

Berdasarkan data yang digunakan dalam analisis, tren perubahan IPM dan perubahan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur terlihat berlawanan (Lihat Tabel 5).

Tabel 5. Perubahan IPM Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Perubahan IPM	Kabupaten/Kota	Perubahan IPM	Kabupaten/Kota	Perubahan IPM
Kab. Pacitan	7.55	Kab. Bondowoso	8.71	Kab. Ngawi	9.01
Kab. Ponorogo	9.35	Kab. Situbondo	8.89	Kab. Bojonegoro	6.88
Kab. Trenggalek	7.52	Kab. Probolinggo	3.23	Kab. Tuban	5.88
Kab. Tulungagung	7.03	Kab. Pasuruan	2.26	Kab. Lamongan	2.63
Kab. Blitar	9.42	Kab. Sidoarjo	11.28	Kab. Gresik	21.58
Kab. Kediri	7.13	Kab. Mojokerto	7.83	Kab. Bangkalan	16.7
Kab. Malang	7.69	Kab. Jombang	8.93	Kab. Sampang	3.38
Kab. Lumajang	7.56	Kab. Nganjuk	7.47	Kab. Pamekasan	9.11
Kab. Jember	9.43	Kab. Madiun	4.58	Kab. Sumenep	3.78
Kab. Banyuwangi	7.06	Kab. Magetan	10.42	Kab. Tuban	6.78
Kota Blitar	8.98	Kota Pasuruan	9.91	Kota Surabaya	7.52
Kota Malang	11.59	Kota Mojokerto	7.83	Kota Batu	
Kota Probolinggo	10.13	Kota Madiun	7.53	Jawa Timur	7.9

Sumber : Analisis Indikator Makro Sosial & Ekonomi Jawa Timur, 2002 dan 2010 (Diolah)

Tabel diatas menunjukkan bahwa IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sementara angka kemiskinannya menurun. Hasil uji korelasi yang dilakukan, perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan perubahan angka kemiskinan memiliki hubungan positif (Lihat nilai *Pearson Correlation* pada Tabel 6). Meskipun data menunjukkan tren perubahan IPM dan perubahan angka kemiskinan terlihat berlawanan, yakni IPM meningkat sementara perubahan angka kemiskinan menurun, akan tetapi hasil uji korelasi menunjukkan hal yang berbeda.

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui bahwa perubahan IPM dan perubahan angka kemiskinan memiliki hubungan positif akan tetapi hubungannya lemah karena nilai koefisien korelasi $<0,5$. Namun, keputusan korelasi antara kedua variabel diputuskan berdasarkan nilai probabilitas, yakni nilai signifikan. Pada tabel 6 terlihat bahwa nilai signifikan korelasi antara kedua variabel $>0,05$. Dengan demikian, perubahan IPM dan perubahan angka kemiskinan tidak memiliki hubungan yang signifikan.

Tabel 6. Hasil Uji Korelasi Perubahan IPM dengan Perubahan Angka Kemiskinan

	Perubahan_Kemiskinan	Perubahan_IPM
Perubahan_Kemiskinan	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	1 .220 .192 37
Perubahan_IPM	Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N	.220 .192 37

Dengan demikian, perubahan IPM memang tidak berkontribusi besar bagi perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Kemungkinan besar perubahan angka kemiskinan berhubungan dengan keberhasilan program - program penanggulangan kemiskinan.

Hubungan Perubahan Pengeluaran Pembangunan dengan Perubahan Angka Kemiskinan di Jawa Timur Pada Pra dan Era Otonomi Daerah.

Realisasi dana pengeluaran pembangunan di Provinsi Jawa Timur

sebagian besar mengalami penurunan dari tahun 2000 hingga tahun 2010. Sementara itu, data realisasi dana pengeluaran pembangunan yang digunakan dalam penelitian ini tidak lengkap. Terdapat beberapa kabupaten/kota yang datanya tidak tersedia. Berikut dapat dilihat perubahan realisasi pengeluaran pembangunan dan perubahan angka kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Timur (Lihat Tabel 7).

Tabel 7. Perubahan Pengeluaran Pembangunan Kabupaten/Kota Di Jawa Timur

Kabupaten/Kota	Perubahan Pengeluaran Pembangunan	Kabupaten/Kota	Perubahan Pengeluaran Pembangunan
Kab. Pacitan	-	Kab. Magetan	-2.53
Kab. Ponorogo	-2.03	Kab. Ngawi	-1.15
Kab. Trenggalek	-0.06	Kab. Bojonegoro	5.96
Kab. Tulungagung	-	Kab. Tuban	-
Kab. Blitar	-2.61	Kab. Lamongan	-0.71
Kab. Kediri	-	Kab. Gresik	11.33
Kab. Malang	5.54	Kab. Bangkalan	0.18
Kab. Lumajang	-	Kab. Sampang	5.94
Kab. Jember	-1.95	Kab. Pamekasan	4.22
Kab. Banyuwangi	-5.86	Kab. Sumenep	-
Kab. Bondowoso	0.48	Kab. Tuban	-
Kab. Situbondo	1.22	Kota Blitar	-0.52
Kab. Probolinggo	-	Kota Malang	-3.16
Kab. Pasuruan	-1.73	Kota Probolinggo	0.22
Kab. Sidoarjo	-	Kota Pasuruan	2.33
Kab. Mojokerto	-	Kota Mojokerto	2.28
Kab. Jombang	4.64	Kota Madiun	-3.54
Kab. Nganjuk	-1.17	Kota Surabaya	-14.61
Kab. Madiun	-1.94		

Sumber : Kementerian Keuangan 2000, 2010 (Diolah)

Jika pengeluaran pembangunan menurun, maka dikhawatirkan angka kemiskinan akan meningkat. Tetapi pada kenyataannya, berdasarkan data yang digunakan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami penurunan meskipun realisasi pengeluaran pembangunan juga menurun. Hasil korelasi menunjukkan bahwa perubahan pengeluaran pembangunan dengan perubahan angka kemiskinan memiliki hubungan negatif, yakni jika perubahan pengeluaran pembangunan menurun maka perubahan angka kemiskinan akan meningkat dan juga sebaliknya. Akan tetapi hubungan antara kedua variabel adalah lemah (Lihat Tabel 8).

Tabel 8. Hasil Korelasi Perubahan Pengeluaran Pembangunan dengan Perubahan Angka Kemiskinan.

	Perubahan _Kemiskinan an	Perubahan _Pengeluaran an
Perubahan_ Pearson Correlation	1	-.068
Kemiskinan Sig. (2-Tailed)		.737
N	37	27
Perubahan_ Pearson Correlation	-.068	1
Pengeluaran Sig. (2-Tailed)	.737	
N	27	27

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa perubahan pengeluaran pembangunan dengan perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tidak memiliki hubungan signifikan karena nilai sig >0,05, meskipun nilai koefisien korelasi menunjukkan adanya hubungan negatif berlawanan. Dengan demikian, besar kecilnya realisasi dana pengeluaran pembangunan tidak berkontribusi besar terhadap tinggi rendahnya angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.

Faktor penyebab dari kurang/tidak adanya kontribusi pengeluaran pembangunan terhadap penurunan angka kemiskinan di Jawa Timur diduga disebabkan oleh kurang tepatnya pembuatan skala prioritas dalam penggunaan dana pengeluaran pembangunan. Hal tersebut dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat dan tingkat kemiskinan yang terjadi. Ini didukung oleh pernyataan Dyah Arini Rudiningtyas (t.t) yang menyebutkan bahwa selektifitas serta prioritas belanja akan menumbuhkan perekonomian yang berdampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, hal ini juga diduga disebabkan oleh penggunaan dana APBD yang lebih besar atau lebih memprioritaskan pengeluaran rutin dari pada pengeluaran pembangunan, sehingga masalah kemiskinan di Jawa Timur belum mampu teratasi dengan baik.

KESIMPULAN

1. Perubahan angka kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur mayoritas mengalami penurunan angka kemiskinan dan hanya sebagian kecil yang mengalami peningkatan angka kemiskinan. Perubahan angka kemiskinan tersebut mayoritas pada kisaran minus 10 persen hingga 20 persen, sedangkan perubahan angka kemiskinan paling sedikit berada pada kisaran minus 20 persen hingga 30 persen serta lebih dari minus 30 persen.
2. Pola distribusi kemiskinan di Provinsi Jawa Timur pada pra otonomi daerah cenderung terkonsentrasi di daerah pesisir baik pesisir utara maupun pesisir selatan, serta pada wilayah perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sedangkan pada era otonomi daerah angka kemiskinan cenderung terkonsentrasi di pesisir utara Jawa Timur.
3. Perubahan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponennya tidak memiliki hubungan signifikan dengan perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, sehingga Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan komponen-komponennya tidak berkontribusi besar dalam penurunan maupun peningkatan angka kemiskinan di Jawa Timur.
4. Perubahan pengeluaran pembangunan dengan perubahan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur tidak memiliki hubungan yang signifikan, yang diduga disebabkan oleh kurang tepatnya pembuatan skala prioritas dalam penggunaan dana pengeluaran pembangunan dan penggunaan dana APBD yang lebih besar atau lebih memprioritaskan pengeluaran rutin dari pada pengeluaran pembangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. (2012). Jatim Raih Penyelenggara Otonomi Daerah Terbaik. Diterima 28 September 2012, dari Rima Koran Online Indonesia (*Rimanews*).
<http://m.rimanews.com/read/20120426/60852/jatim-raih-penyelenggara-otonomi-daerah-terbaik>
- Pemerintah. (1999). *Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pemerintah.
- Pemerintah. (2004). *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Pemerintah.
- Darise, Nurlan. (2009). *Pengelolaan Keuangan Daerah (Rangkuman 7 UU, 30 PP Dan 15 Permendagri)*. Jakarta : PT. Macanan Jaya Cemerlang.
- Henninger, N., and Snell, M. (2002). *Where Are The Poor ? Experiences with The Development and Use of Poverty Maps*. Washington,DC : World Resources Institute.
- Badan Pusat Statistik. (2011). *Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Makro Indonesia 2011*. Jakarta. BPS.
- Wijayanto, R. Dwi. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008. Skripsi (*dipublikasikan*). Semarang. Universitas Diponegoro.